**KERJASAMA INDONESIA DENGAN ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
(IDB) DALAM PROGRAM MEMBER COUNTRIES PARTNERSHIP
STRATEGY (MCPS) 2011-2014**

Oleh : Nurvia Susanti

Email : susantynurvia@gmail.com

Dosen Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP. M.Si

**Bibliografi : 14 Buku, 10 Jurnal, 5 Laporan, 3 Dokumen Resmi, 15
Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp Baru Pekanbaru
28293
Telp/Fax. 076163277

Abstract

This research describes the cooperation between Indonesia and Islamic Development Bank (IDB) in program known as Member Countries Partnership Strategy (MCPS). In this case, Indonesia is country with the largest economy in Southeast Asia with GDP per capita that has been steadily rising. In fact, the GDP growth as much six percent in 2012 and Muslim population in majority. However, the country is still struggling against poverty, educational problem, health-care and infrastructure development. Therefore, to solve this problem Indonesia should cooperate with another country or international organization, like Islamic Development Bank (IDB).

The research was obtained by reviewing the literature either from books, journals, theses, reports, and internet. In this research, the author uses neo-liberalist perspective with international cooperate theory by K.J Holsti and Charles H. Cooley, international organization theory by Clive Archer and A. Le Roy Bennet with level analysis in nation-state.

Indonesia's economic plan follows a 20-year development plan, spanning from 2005 to 2025. It is segmented into 5-year medium-term plans, called the RPJMN with different development priorities. In this research found that the program MCPS has positively contributed to the second phase of medium term plans. Implementation of the project program MCPS applied in education and health-care sector, poverty alleviation, infrastructure sector, and agricultural sector.

Keywords: *Islamic Development Bank (IDB), Member Countries Partnership Strategy (MCPS), medium-term plans (RPJMN)*

Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas tentang kerjasama Indonesia dengan

Islamic Development Bank (IDB) dalam program Member Country Partnership Strategy (MCPS) yang ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Politik

Internasional dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang merupakan konsentrasi Hubungan Internasional.

Islamic Development Bank (IDB) adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 (15 Syawal 1395 H) oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dewasa ini, anggota IDB terdiri atas 57 negara yang merupakan anggota OKI. Indonesia merupakan salah satu negara anggota IDB.

Islamic Development Bank (IDB) merupakan mitra penting bagi pembangunan Indonesia. Indonesia bergabung dengan IDB sebagai salah satu pendirinya pada tahun 1975 dengan kepemilikan saham sebesar 2,25 persen.¹ Dengan demikian, pemerintah menekankan pentingnya IDB dalam mendorong pembiayaan infrastruktur dan terus mendorong IDB memperbaiki proses pencairan bank untuk memastikan bahwa pembiayaan proyek-proyek penting dapat dimobilisasi secara lebih cepat.

Dewasa ini, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Pendapatan nasional bruto per kapita negara yang terus meningkat, dari \$ 560 di tahun 2000 menjadi \$ 3.374 pada tahun 2015.² Sebagai negara yang luas, Indonesia sangat berkembang sejak 2010. Selama krisis keuangan global,

Indonesia mengungguli negara-negara tetangga yang tergabung dalam G20 termasuk Cina dan India.

Pemerintah telah mempromosikan kebijakan fiskal yang konservatif, sehingga rasio utang terhadap PDB kurang dari 25% dan tingkat historis rendah dari inflasi.³ Faktanya Indonesia masih berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi, peraturan lingkungan yang kompleks, dan distribusi sumber daya yang tidak merata antar daerah.

Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 14,15 persen, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 32,53 juta individu.⁴ Angka ini cukup besar khususnya jika dibandingkan dengan jumlah orang miskin di negara-negara tetangga. Hal ini menjadi tantangan dan mendapat perhatian oleh pemerintah Indonesia. Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin, kerentanan kemiskinan merupakan masalah tersendiri.

Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bangsa. Pendidikan di Indonesia masih belum merata dan membutuhkan peningkatan kualitas. Pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang

¹ Islamic Development Bank. diakses melalui <http://www.isdb-pilot.org/> pada tanggal 03 Oktober

² World Bank. Indonesia Overview. diakses melalui <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> Pada tanggal 02 Oktober 2016

³ Indonesia Economy Profile 2014. diakses melalui

http://www.indexmundi.com/indonesia/economy_profile.html pada tanggal 02 Oktober 2016

⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perkemangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Diakses melalui <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/> pada tanggal 03 Oktober 2016

seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Rendahnya tingkat pendidikan akan berakibat pada naiknya angka kemiskinan.

Kemiskinan dan pendidikan, masalah pembangunan infrastruktur secara merata merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan infrastruktur adalah salah satu penunjang masuknya investasi di Indonesia.

Keadaan sarana infrastruktur kurang memadai, akan membuat investor asing berpikir dua kali untuk memberikan investasi di Indonesia. Tantangan pemerintah yang kompleks haruslah diberantas untuk memajukan negara Indonesia. Salah satu cara yang di tempuh yaitu dengan menerapkan kerjasama internasional bersama IDB dengan Program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) 2011-2014.

Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia dan IDB menyusun kerjasama untuk program baru IDB "the *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) Yang merupakan

strategi pembiayaan bersama antara pemerintah Indonesia dan IDB.⁵ *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) adalah model bisnis baru yang diadopsi dari Grup IDB yang mana MCPS dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan pengembangan hasil Grup dengan menyelaraskan prioritas negara anggota.

Landasan Teoritis

Persepektif adalah sudut pandang atau bagaimana cara kita memandang suatu hal. Perspektif dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai sudut pandang yang di pakai untuk memahami fenomena-fenomena atau masalah-masalah dan lain-lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kajian hubungan internasional.

Pada penulisan penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif neo-liberalis. Pandangan kaum neoliberalis, kerjasama internasional (dalam bentuk kooperasi) bagi negara adalah sebuah investasi yang akan menguntungkan bagi negara tersebut. Neo-liberal memandang bahwa negara merupakan aktor rasional yang egois, negara akan selalu berupaya memaksimalkan kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian yang didapat oleh negara lain. Keberadaan kerjasama internasional, negara mampu meraup keuntungan lebih untuk menjamin keberadaannya.⁶

⁵ Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Keterangan Pers. Pelaksanaan Rangkaian Sidang Tahunan Dewan Gubernur Is lamic Development Sank (IDS) Ke-3520-24 Juni 2010, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/> pada tanggal 02 Oktober 2016

⁶ Hansclever, Andreas, Peter Mayer dan Volker Riterger, 200. *Intergrating Theories of International Regims, dalam Review of International Studies*, Vol, 26, No 1

Menurut John Stuart Mill, negara harus lepas tangan dalam sebagian besar (namun tidak dalam segala bidang kehidupan), perlu campur tangan negara dalam pendidikan, bantuan untuk orang miskin, dengan asumsi individu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.⁷ Sesuai dengan permasalahan diatas, dalam memerangi kemiskinan dan masalah pendidikan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya.

Menurut John Maynard Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan terutama disaat perekonomian berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan.⁸

Mochtar Mas'ood menyebutkan lima level analisis adalah individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara dan sistem internasional. Level analisa yang digunakan oleh penulis adalah level analisa negara-bangsa (*nation-state*), dimana asumsi dasar dari tingkat analisa ini yaitu seringkali negara-negara tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan sebagai sebuah kelompok.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori. Teori yang pertama penulis gunakan adalah teori kerjasama internasional oleh K.J. Holsti. Kerjasama internasional merupakan proses kerjasama atau kolaborasi yang

terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara.⁹ Menurut teori ini hubungan kerjasama dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan.

Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila ada orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang paling penting dalam kerjasama yang berguna.

Teori yang kedua adalah Teori Organisasi Internasional. Organisasi Internasional di defenisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintahan dan non-pemerintahan) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan menegejar kepentingan bersama para anggotanya.

⁷ Teuku May Rudy. 2007. *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*. Bandung : Nuansa

⁸ John Maynard Keynes- Timeline. Di akses melalui <https://www.maynardkeynes.org/keynes-career-timeline.html> pada tanggal 12 Desember 2016

⁹ K..J. Holtsi. 1998, *Politik Internasional, Kerangka Analisis Untuk Berpikir, Jilid 2*, Terjemahan M Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemunya bagi negara-negara anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang Organisasi Internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan ertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.¹⁰

Fungsi Organisasi Internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang esar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.

Aspek fungsi dalam Organisasi Internasional merupakan konsep yang dapat membantu permasalahan di

Indonesia. Hal ini terkait fungsi utama IDB yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islami untuk pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat negara anggotanya. Pembiayaan ini di fokuskan pada kesejahteraan sosial yang melalui program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS). Program MCPS tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pemerantasan kemiskinan.

Pembahasan

Kerjasama Indonesia dengan dengan *Islamic Development Bank* (IDB) dimulai sejak terbentuknya IDB pada tahun 1975. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri IDB dimana keanggotaan IDB pada saat itu adalah anggota dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Pada awal tahun 1431 H (2010) *Islamic Development Bank* (IDB) memperkenalkan dan meresmikan program baru yang disebut dengan *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS).¹¹ Program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) merupakan alat untuk aktualisasi model bisnis baru dari IDB. Hal demikian merupakan kegiatan prioritas utama dalam pelaksanaan visi dan misi IDB. Program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) merupakan usaha pembiayaan untuk anggota IDB dengan melibatkan semua *Group-wide* dari IDB.

¹⁰Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: Allen and Uwin Ltd.

¹¹ Islamic Development Bank . *Annual report 35th*. Diakses melalui

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/35th/AnnualReport35.pdf pada tanggal 15 Januari 2017

Member Countries Partnership Strategy (MCPS) berupaya untuk mempromosikan kemitraan yang saling menguntungkan antara negara-negara anggota seperti transfer teknologi, investasi lintas batas, pertukaran perdagangan dan berbagi pengalaman negara yang secara kolektif dikenal sebagai dari "*Reverse Linkages*" (RL).

Keputusan Indonesia untuk melakukan strategi pembiayaan antara *Islamic Development Bank* (IDB) dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) dimulai pada tanggal 23 Maret 2010.¹² Keputusan ini menandakan bahwa Indonesia memulai proses pembentukan untuk dokumen kerja (*Partnership Strategy Paper*) *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) for Indonesia.

Pada tanggal 2 April 2010, diselenggarakan pertemuan pertama antara pemerintah Indonesia dengan badan penasehat IDB-Group dalam membahas proses pembentukan *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) for Indonesia. Pertemuan tersebut membahas tentang *Road Map* MCPS Indonesia, kegiatan-kegiatan untuk MCPS Indonesia, tugas-tugas yang akan diidentifikasi dan pembagian kerja yang disepakati.

Pada pertemuan konsultasi proses pembentukan *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) for Indonesia melibatkan wakil presiden (bagian operasi) *Islamic Development*

Bank (IDB) Birama Boubacar Sidibe dan dari pihak Indonesia melibatkan perwakilan dari Departemen Keuangan (KEMENKEU) dan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS). Wakil Presiden IDB memimpin misi dialog kebijakan untuk Indonesia terkait dengan identifikasi keterlibatan kontur luas area inti (wilayah) dalam kerangka kerja MCPS.

Hasil pertemuan tersebut diantaranya : Pertemuan misi ke Indonesia dilakukan selama 26 Juni-2 Juli 2010, Persiapan *Concept Note* diadakan pada 3 Agustus 2010, konsultasi internal (tiga *pertemuan Group-wide consultation meetings and dry-runs* untuk Lokakarya Regional diadakan sebelum *Main Mission*), Misi utama untuk Indonesia (selama 20 September - 2 Oktober 2010) meliputi konsultasi di sektor dan regional melalui lima Lokakarya. Permulaan untuk Nasional di Jakarta, tiga Lokakarya Regional di Palembang (Sumatra Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Manado (Sulawesi Utara).

Pada tanggal 20-24 Juni 2010 diselenggarakan rangkaian sidang tahunan *The 35th Annual Meeting of the Board of Governors of the Islamic Development Bank* (IDB) di Baku, Azerbaijan yang dihadiri oleh 56 negara anggota termasuk Indonesia. Dalam Pertemuan tersebut, menetapkan Indonesia sebagai *second pilot project* untuk program baru IDB "*the Member Countries Partnership Strategy* (MCPS).¹³ *The first pilot project* dalam

¹² Islamic Development Bank. *MCPS Republic of Indonesia 2011-2014*. Diakses melalui [http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Partnership Strategies/Indo](http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Partnership%20Strategies/Indonesia.pdf)

[nesia.pdf](#) diakses pada tanggal 10 September 2017

¹³ Kementerian Keuangan Indonesia. *Keterangan Pers. Pelaksanaan Rangkaian Sidang Tahunan Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IDB) Ke-35 20-24 Juni 2010, Baku, Azerbaijan*. Diakses melalui

program baru MCPS ditetapkan untuk negara Turkey. Penetapan tersebut menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah ikut dalam program *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS).

Peluncuran Program MCPS di Indonesia

Pelaksanaan konsultasi Regional dan Nasional yang dilakukan IDB pada tanggal 20 September sampai 02 Oktober dalam rangka tinjauan daerah, pelaksanaan workshop dan diskusi penyusunan dokumen kerja menghasilkan keputusan bahwa pembiayaan disesuaikan dengan fokus prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Hal ini berdasarkan *comparative advantage* IDB untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan tersebut, kerja sama Pemerintah Indonesia dengan IDB lebih difokuskan pada beberapa sektor prioritas antara lain:

1. Sektor Pendidikan/Kesehatan, terutama Pendidikan Tinggi – termasuk pendidikan tinggi Islam;
2. Sektor Infrastruktur dan Energi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Swasta/*Public Private Partnership*;
3. Sektor Pengentasan Kemiskinan termasuk di antaranya program PNPM, Pemberdayaan Masyarakat;

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/siaran_pers/Ket_Press.pdf pada tanggal 04 Oktober 2016

¹⁴ BAPPENAS.,*Ibid*

4. Sektor Pertanian dan *Rural Development*.¹⁴

Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi patokan kerjasama antara IDB dengan pemerintah Indonesia. Rancangan kesepakatan tersebut merupakan alasan yang kuat mengapa Indonesia ikut dalam program MCPS. Empat prioritas yang terdapat dalam rancangan tersebut dituangkan dalam dokumen kerjasama antara IDB dan Indonesia. Dokumen kerjasama program MCPS selesai pada awal tahun 2011. Dokumen kerjasama tersebut berisi tentang review keadaan Indonesia (sosial, politik, ekonomi), pertumbuhan ekonomi, Indonesia, dan rencana pembangunan dalam program MCPS 2011-2014.

Pada tanggal 11 Mei 2011 diselenggarakan agenda IDB *day* sekaligus untuk meluncurkan Program Member Country Partnership Strategy (MCPS). Launching MCPS ini ditandai dengan penyerahan dokumen kerja sama oleh Presiden IDB, Ahmed Mohamed Ali Al-Madani, kepada Menteri Keuangan Indonesia, Agus D.W. Martowardojo. Presiden IDB mengatakan bahwa indikasi pembiayaan nasional untuk MCPS periode 2011-2014 diperkirakan berkisar antara US\$3-3,3 Miliar.¹⁵ Di Indonesia, program ini dibagi menjadi dua tingkatan yaitu wilayah Jawa-Bali (disebut sebagai Program

¹⁵ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia. *Kerja Sama Indonesia dengan Islamic Development Bank Melalui Strategi Kemitraan Negara Anggota*. Diakses melalui <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20110513152434657438141> pada tanggal 23 Februari 2017

Regional) dan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (di sebut sebagai Program Tingkat Wilayah).

Kerangka Kerja *National Level Program and Regional Level Program*

Indonesia menjadi negara kepulauan yang luas yang terdiri dari dari sekitar 17.508 pulau membuatnya penting menjadi sangat selektif dalam hal daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik.

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini, konsentrasi utama *Islamic Development Bank* (IDB) adalah di Jawa-Bali dan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.¹⁶ Program tingkat sektor IDB Grup yang menargetkan mengurangi hambatan-hambatan utama sehingga dapat membantu dalam menjaga momentum pembangunan di daerah Jawa, Bali dan Sumatera, dan percepatan pembangunan di Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Fokus program dari MCPS meliputi 2 wilayah yaitu: wilayah Jawa Bali disebut *National Level Program*, dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi disebut *Regional Level Program*.

Prioritas Pembangunan *Multi Sector Program Member Countries Partnership Strategy* (MCPS)

Dalam konteks MCPS ini, peran IDB Group bersama dengan mitra pembangunan lainnya adalah untuk membantu Pemerintah baik nasional maupun provinsi merealisasikan sebelas prioritas RPJMN 2010-2014. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, prioritas pembangunan *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS) difokuskan pada empat sektor yaitu : sektor pendidikan dan kesehatan, sektor infrastruktur dan energi, sektor pengentasan kemiskinan dan sektor pertanian.

Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Dalam program MCPS, IDB memberi dukungan untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia. Proyek dukungan untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia melibatkan empat Institut Agama Islam Nasional (IAIN), yaitu IAIN Sumatra Utara (Medan, Sumatra Utara), IAIN Raden Fatah (Palembang, Sumatra Selatan), IAIN Walisongo (Semarang, Jawa Tengah), dan IAIN Mataram (Mataram, Nusa Tenggara Barat).¹⁷ Proyek ini

¹⁶ Islamic Development Bank. *MCPS Republic of Indonesia 2011-2014*. Diakses melalui <http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/>

[CM/Publications/Partnership_Strategies/Indonesia.pdf](#) diakses pada tanggal 10 September 2017

¹⁷ Islamic Development CGO Indonesia. *Support to the Development of Higgher*

secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas Lembaga PTI melalui peningkatan dan pengadaan fasilitas dan mengembangkan kurikulum dan pelatihan staf pengajar di keempat IAIN tersebut.

Proyek *The Support to the Development of Higher Education Project* atau dikenal sebagai Proyek 7 in 1, didanai dengan pinjaman IDB sebesar USD 174,01.¹⁸ Proyek tersebut merupakan bagian dari Pilar Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (*Member Country Partnership Strategy – MCPS*) (2011-2014) untuk Indonesia, dan berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas Lembaga Pendidikan Tinggi dengan meningkatkan struktur dan peralatan, serta pengembangan kurikulum dan keterampilan. Proyek ini ditujukan untuk memperluas akses sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan sesuai dengan Strategi Sektor Energi dari Pemerintah Indonesia.

Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas merupakan target dalam prioritas kesehatan RPJMN 2010-2011. Usaha yang dilakukan dalam Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi yaitu diseut dengan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Pada sektor kesehatan *Proyek Community Based Sanitation Project in Indonesia* atau SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat/*Community Based Sanitation*) merupakan proyek yang bertujuan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh defekasi terbuka dan sanitasi yang buruk.¹⁹ Proyek ini bertujuan untuk menyediakan layanan sanitasi dasar yang akan meningkatkan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Sanitasi dan Kebersihan Air (WASH).

Proyek tersebut sesuai dengan MCPS Indonesia (2011) dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang bertujuan untuk memberantas kebiasaan buang air besar sembarangan pada tahun 2014. Jumlah dana pinjaman proyek ini dari IDB adalah USD 100 juta.²⁰ proyek ini akan menyediakan infrastruktur sanitasi dasar di 1.800 lokasi yang berada di 48 kota di 13 provinsi yaitu: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Sektor Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu program yang penting dalam RPJMN 2010-2014 karena mendukung pertumbuhan ekonomi dan laju investasi asing untuk Indonesia. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional

Education Project Indonesia. Diakses melalui <http://isdb-indonesia.org/id/project/support-to-the-development-of-higher-education-project-indonesia/> pada tanggal 03 Maret 2017

¹⁸

BAPPENAS.,lop.cit

¹⁹ Islamic Development Bank CGO Indonesia. *Sanimas Community Based Sanitation Project*. Diakses melalui <http://isdb-indonesia.org/id/project/sanimas-community-based-sanitation-project/> pada tanggal 05 Maret 2017

²⁰ BAPPENAS.,lop.cit

dalam kerangka RPJMN adalah infrastruktur nasional memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program pembangunan infrastruktur yang dibantu oleh IDB adalah Proyek Pembangunan Jalan Regional (RRDP) yang efektif pada tahun 2014. Proyek ini berupa pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 410 km dan renovasi 169 jembatan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah.²¹ Pinjaman IDB mendanai kegiatan di wilayah Jawa Tengah dengan total panjang kurang lebih 86,3 km yang terdiri dari 3 ruas jalan, yaitu ruas jalan Tambak Mulyo –Wawar, Giri Woyo – Duwet, dan Wawar –Congot. Proyek ini sesuai dalam prioritas MPCPS Indonesia yang sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah Indonesia.

Proyek *Regional Road Development* merupakan proyek *co-financing* antara *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB). Proyek yang turut didanai oleh Asian Development Bank (ADB) ini akan meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi jalan raya secara umum dan meningkatkan jaringan transportasi jalan raya dengan perluasan, perbaikan dan pembangunan ruas-ruas jalan baru. Proyek ini juga akan

mendorong kerja sama regional, karena jalan yang telah diperbaiki di Kalimantan merupakan jalur transportasi utama ke negara tetangga Malaysia dan Brunei

Sektor Pengentasan Kemiskinan

Kontribusi *Islamic Development Bank* (IDB) dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan dana pada program PNPM Mandiri.²² Proyek ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 tahun 2010-2014 (mendukung tiga bidang prioritas dalam pemberantasan kemiskinan), Strategi Pembangunan Perkotaan, dan Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk program PNPM Mandiri yang lebih luas. Proyek ini juga sejalan dengan pilar Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam MCPS untuk Indonesia.

Proyek Pembangunan Terintegrasi Berbasis Masyarakat (*Integrated Community Driven Development* PNPM ICDD Phase II merupakan proyek pembangunan kapasitas komunitas dan masyarakat miskin di perkotaan di 14 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek PNPM ICDD Phase II sudah melakukan penyerapan sebesar USD

²¹Islamic Development Bank CGO Indonesia. *The Regional Roads Development Project*. Diakses melalui <http://isdb-indonesia.org/id/project/the-regional-roads-development-project-rrdp/> pada tanggal 05 Maret 2017

²² Islamic Development Bank CGO Indonesia. *PNPM Mandiri Indonesia*

Intergrated Community. Diakses melalui <http://isdb-indonesia.org/id/project/pnpm-mandiri-indonesia-integrated-community-driven-development-icdd-phase-iii-project-icdd-phase-iii-project/> pada tanggal 10 Maret 2017

5,54 juta dari bantuan dana yang diberikan oleh IDB.²³ Sejak permulaan ICDD Fase I, IDB telah membantu program PNPM Mandiri untuk secara bertahap berubah dari Pemberdayaan Masyarakat menjadi Pemberdayaan Ekonomi.

Pada ICCD Fase II, proyek tersebut memperkuat aktivitas ekonomi dengan Program Peningkatan Mata Pencaharian, meningkatkan dana yang beredar yang disediakan dalam Fase I dan memperkenalkan pengembangan kapasitas mata pencaharian Kelompok Swadaya (SHG) di lebih dari 500 desa. Dalam Fase II ini, Program Peningkatan Mata Pencaharian juga akan diperluas ke 700 desa dan proyek tersebut akan memperkenalkan Pusat Pengembangan Bisnis percontohan di tingkat Kecamatan untuk membantu memberikan akses pasar bagi produk-produk dan jasa di 10-15 Kecamatan.

Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, *International Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC) yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank (IDB) group bekerjasama dengan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dalam pengembangan dan pendanaan inovatif yang akan mentransformasikan rantai pasokan kopi Indonesia. Program ini ITFC akan menyumbangkan dana USD 70.000.²⁴ Sementara, PT Coffindo sebagai mitra lokal menghibahkan lahan seluas 2 hektare (ha)

dan memberikan IFTC untuk meralisasikan program yang dicanangkan pemerintah RI.

Program pendanaan tersebut meliputi wilayah Lampung, Jawa Timur, Jambi dan Palembang yang 50% merupakan produsen kopi robusta. Program ini sangat didukung oleh pemerintah, terbukti dengan adanya pemerintah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan racun hama untuk meningkatkan kualitas dan harga kopi.

Program yang terkait dalam sektor pertanian selanjutnya adalah Pinjaman *The Post Tsunami Rehabilitation of Agriculture Infrastructure In NAD Province*. Pinjaman Islamic Development Bank dengan intansi penanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Dengan penyerapan dana pinjaman yang hanya 50,53% dari total dana pinjaman USD 15 juta.²⁵ Proyek pinjaman ini bertujuan untuk merehabilitasi produktivitas pertanian masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam setelah terkena gempa dan tsunami.

Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) bantuan IDB merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Basis kegiatan proyek adalah perbaikan jaringan irigasi dan lahan pada skim irigasi desa, dan kegiatan lain yang akan meningkatkan kemampuan petani.

²³ BAPPENAS.,op.cit. hal 61

²⁴Technology Indonesia. *ITFC dan AEKI Luncurkan Program Pendanaan untuk Tingkatkan Ekspor Kopi Indonesia*. Diakses melalui <http://www.technology-indonesia.com/index.php/pertanian-dan-pangan/perkebunan/1079-itfcaeki> pada tanggal 11 Maret 2017

²⁵ BAPPENAS. *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2011*. Diakses melalui <http://www.bappenas.go.id/files/lkphln/2011/ringkasan-eksekutif-laporan-kinerja-pelaksanaan-proyek-pinjaman-luar-negeri-edisi-triwulan-iv-tahun-2011.pdf> pada tanggal 14 Maret 2017

Proyek ini dilakukan di sepuluh kabupaten yang terdapat di provinsi Aceh, yaitu: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bieureun, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur

Pendirian *Country Gateway Office Islamic Development Group (IDB) di Indonesia*

Kamis tanggal 28 Februari 2013 di Jakarta, Menteri Keuangan RI dan Presiden *Islamic Development Bank (IDB) Group* bersama-sama menandatangani kesepakatan sebagai *Host Country Agreement (HCA)* atas pendirian *Country Gateway Office* atau Kantor Pada dokumen kerjasama program MCPS untuk Indonesia terdapat rencana pendirian kantor cabang IDB yang akan dibangun di negara Indonesia.

Pendirian kantor cabang IDB di Indonesia merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan dari Program MCPS.²⁶ Tujuannya adalah agar memudahkan dan membantu entitas IDB-Group untuk lebih berkoordinasi dengan proses birokrasi yang rumit di Indonesia.

Pada hari Perwakilan Baru di Jakarta.²⁷ Acara penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan seminar dengan tema *The Role of IDB Group in Private Sector and Public-Private Partnership Investment* di Indonesia. Seminar tersebut membahas peluang

atas Pembiayaan IDB-Group bagi sektor swasta nasional dan pembangunan Indonesia.

Pembukaan Kantor Perwakilan Baru di Jakarta dinilai sangat penting karena Indonesia merupakan negara pengutang IDB terbesar di antara negara-negara anggota lainnya. Faktanya, IDB memandang Indonesia merupakan salah satu mitra strategis diantara negara-negara anggota IDB lainnya selain Turki. Alasan lainnya adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai sangat baik dan terus tumbuh, konsumsi atau daya beli masyarakat yang terus meningkat, situasi makroekonomi yang stabil, laju inflasi yang stabil, dan yang paling utama adalah kejelasan pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia .

Berdasarkan laporan Keterangan Pers dari Kementerian Keuangan, banyak manfaat yang akan didapat dari adanya kesepakatan pembukaan Kantor Perwakilan Baru oleh IDB di Indonesia. Manfaat tersebut bisa didapatkan oleh kedua belah pihak baik dari Indonesia maupun pihak IDB sendiri.

Keuntungan untuk Indonesia, dengan dibukanya Kantor Perwakilan Baru IDB di Jakarta tentu segala urusan yang berkaitan dengan IDB akan semakin mudah karena akan didelegasikan di Jakarta, tidak lagi harus ke Jeddah yang merupakan kantor pusat dari IDB. Sedangkan bagi pihak IDB sendiri, dengan adanya kesepakatan tersebut pihak IDB akan dapat

²⁶ Islamic Development Bank. *MCPS Republic of Indonesia 2011-2014*. Diakses melalui http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Partnership_Strategies/Indonesia.pdf diakses pada tanggal 10 September 2017

²⁷ Islamic Development Bank. *MCPS Republic of Indonesia 2011-2014*. Diakses melalui http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Partnership_Strategies/Indonesia.pdf diakses pada tanggal 10 September 2017

mengambil peran lebih besar lagi dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia, baik di sektor publik maupun sektor privat.

SIMPULAN

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan pendapatan nasional bruto per kapita negara telah terus meningkat tetapi, Indonesia masih berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai. Keterlambatan penanganan infrastruktur yang merupakan masalah kompleks yang harus ditangani segera oleh Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah dalam negeri seperti pendidikan, kesehatan pengentasan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur adalah dengan memanfaatkan kemitraan baik lingkup regional maupun internasional. Salah satu langkah kerjasama yang Indonesia terapkan adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri kepada lembaga keuangan *Islamic Development Bank* (IDB).

Islamic Development Bank (IDB) adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 (15 Syawal 1395 H) oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Saat ini, anggota IDB terdiri atas 57 negara yang juga anggota OKI. *Islamic Development Bank* (IDB) merupakan mitra penting bagi pembangunan Indonesia. Indonesia bergabung dengan IDB sebagai salah satu pendirinya pada tahun 1975 dengan kepemilikan saham sebesar 2,25 persen.

Islamic Development Bank (IDB) merupakan lembaga keuangan yang meminjamkan dana terbesar ke tiga untuk Indonesia. Pembiayaan yang

dilakukan IDB sangat menguntungkan Indonesia karena sistem keuangan yang digunakan berbasis syariah yang mana tidak ada bunga dalam setiap peminjamaman.

Pada tahun 2010 *Islamic Development Bank* (IDB) memperkenalkan program baru yang disebut dengan *Member Countries Partnership Strategy* (MCPS). Indonesia ikut dalam program MCPS yang dirancannng oleh IDB.

Pada tahun 2011 Indonesia meresmikan peluncuran program MCPS dalam kurun waktu empat tahun yaitu 2011-2014. Indonesia ikut dalam program MCPS karena akan memberikan kontribusi positif terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada penyusunan program kerja MCPS disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014 Republik Indonesia.

Dalam RPJMN 2010-2014 terdapat 12 prioritas pembangunan nasional, dari 12 prioritas tersebut terdapat 4 sektor yang menjadi fokus kerjasama Indonesia dengan IDB dalam program MCPS yaitu, sektor pendidikan dan kesehatan, sektor pengentasan kemiskinan, sektor infrastruktur, dan sektor pertanian.

Pada sektor pendidikan dalam program MCPS, IDB memberi dukungan untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia dan Proyek *The Support to the Development of Higher Education Project* atau dikenal sebagai Proyek 7 in 1 untuk perguruan tinggi negeri.

Pada sektor kesehatan adalah proyek penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas merupakan target dalam prioritas kesehatan RPJMN dan pelaksanaannya dikaitkan dengan program MCPS. Usaha yang dilakukan dalam Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi yaitu diseut dengan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Pada sektor infrastruktur, Program pembangunan infrastruktur yang dibantu oleh IDB dalam program MCPS adalah Proyek Pembangunan Jalan Regional (RRDP). Proyek *Regional Road Development* merupakan proyek *co-financing* antara *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB).

Kontribusi *Islamic Development Bank* (IDB) dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan dana pada program PNPM Mandiri. IDB telah membantu program PNPM Mandiri untuk secara bertahap berubah dari Pemberdayaan Masyarakat menjadi Pemberdayaan Ekonomi.

Pada sektor pertanian, program MCPS diterapkan untuk perbaikan jaringan irigasi dan lahan pada skim irigasi desa, dan kegiatan lain yang akan meningkatkan kemampuan petani. Program MCPS dalam meningkatkan mutu pertanian memberikan pelatihan kepada petani agar hasil pertanian semakin meningkat. Dalam peningkatan mutu, pelatihan dilakukan oleh , *International Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC) yang merupakan bagian dari *Islamic Development Bank* (IDB) group.

Kontribusi positif yang didapatkan oleh Indonesia dalam program MCPS

pada tahun 2011-2014 sangat banyak. Pada tahun 2011 proyek yang dilaksanakan berjumlah delapan proyek. Pada tahun 2012 proyek yang dilaksanakan adalah sepuluh proyek. Pada tahun 2013 adalah sepuluh proyek. Pada tahun 2014 empat belas proyek.

Daftar Pustaka

Jurnal

Adul Razak Nor Azam dan Mustafa Daud “*Islamic Development Bank, Foreign Aid and Economic Growth in Africa: A Simultaneous Equations Model Approach*” (*International Journal of Economics and Finance*, 2012) Vol 4, No. 6

Hansclever, Andreas, Peter Mayer dan Volker Riterger, 200. “*Intergrating Theories of International Regims, dalam Review of International Studies*”, Vol. 26, No.1

Ulfa Jamilatul Farida, “*Prospek IDB Sebagai Representasi Keangkitan Sistem Ekonomi Islam Ditengah Konstelasi Ekonomi Internasional*” (Jurnal Ekonomi Islam , 2010) Vol IV No.1

Buku

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London:Allen and Uwin Ltd.

Baldwin, David A. 1993. *Neorealism and Liberalism : The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Pers

Delairnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga

K..J. Holtsi. 1998, *Politik Internasional, Kerangka Analisis Untuk Berpikir, Jilid 2*, Terjemahan M Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Mas'ood Mohtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Website

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Peresmian Pembukaan Kantor Cabang Gateway IDB-Group di Indonesia. Diakses melalui <http://fiskal.depkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20141212110932322665548> pada tanggal 2 April 2017

Bappenas. Kerjasama Indonesia dengan Islamic Development Bank. Diakses melalui <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/kerjasama-pemerintah-indonesia-dengan-islamic-development-bank/> pada tanggal 06 Oktober 2016

BAPPENAS. Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Tahun 2014 di akses melalui <http://www.bappenas.go.id/files/7214/2788/3985/1.BukuLaporanTWIV2014REV.pdf> pada tanggal 15 Maret 2017

Berita Satu. *Islamic Development Bank Buka Kantor di Jakarta*. Diakses melalui <http://www.beritasatu.com/bank-dan->

[pembiayaan/222569-islamic-development-bank-buka-kantor-di-jakarta.html](http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/222569-islamic-development-bank-buka-kantor-di-jakarta.html)

Islamic Development Bank. Member Country Partnership Strategy Republic of Indonesia: Harnessing Potential Regional 2011-2014. Diakses melalui <http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/PartnershipStrategies/Indonesia.pdf> pada tanggal 03 Oktober 2016

Indonesia Economy Profile 2014. diakses melalui http://www.indexmundi.com/indonesia/economy_profile.html pada tanggal 02 Oktober 2016

Kementerian Keuangan Indonesia. IDB Mitra Penting Pembangunan Indonesia. Diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-idb-mitra-penting-pembangunan-indonesia> pada tanggal 04 Oktober 2016

Kompas. *IDB dan Indonesia Bentuk MCPS*. Diakses melalui <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/11/1031118/IDB.dan.Indonesia.Bentuk.MCPS> pada tanggal 02 Oktober 2016